

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amidurddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Beniharmoni Harefa, et al., 2022, *Pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19*, Deepublish.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West, St. Paul.

Chandra T. Y., 2022, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*, Cet. 1, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.

Fadli Razez Sanjani, 2015, "*Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*". JOM Fakultas Hukum.

Indriyanto Seno Adji, 2001, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

John Rawls, 1999, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, New York.

**Eka Maina Listuti, 2024**

**PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI INDONESIA** 74

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 66, lihat juga dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Malang.
- M. Anwar. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, GP Press Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnomo E. H. 2022. “*Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana*”, Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- RT. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Penganatar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sukismo, 2008, *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*, Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta.

Wahyono P., 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

#### **ARTIKEL/ KARYA ILMIAH LAINNYA**

Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.

Asriyani, Arini. 2018. “*Legal Protection of a Witness Cooperating Person (Justice Collaborator) In Exposing the Criminal Acts of Corruption, IOSR Journal of Humanities And Social Science*”, Vol. 23, issue 2, Ver. 11

Ayu Diah Pradnya Swari P.J and Ni Nengah Adiyaryani, “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *E-Journal Hukum*, Vol. 7, No. 5, (2018), hlm. 1.

Dena Aji, dkk., 2023. “Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer”, *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 106-113.

**Eka Maina Listuti, 2024**

***PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI INDONESIA*** 77

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- F. B. Yanri. (2017, Maret). *Pembunuhan berencana. Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (1), 36-48
- Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B., “Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3 No. 4, 2022, hlm. 4.
- Gagah Putra Perdana dan Rahtami Susanti, 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)”, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 59.
- Hariman Satria, 2016, “Menakar Pelindungan Justice Collaborator”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016
- Lestari Ni Nyoman R. D, Dewi A. A. S. L dan Widyantara I Made M., 2023, “Justice collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022>. 8–13
- Mamahit C. E. *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*. *Lex Crimen*. 2016.
- Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge, Toward A Media History of Documents*, Vol. 20, No. 3 (2013), hlm. 29-34.
- Rumadan, I., 2017, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Supriadi Widodo Eddyono, 2011, “*Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*”, Jurnal Perlindungan, Vol. 1 No. 1.

Tata Wijayanta, 2014, “*Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Utomo, N. P., 2013, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

## **INTERNET**

“*Bharada E Ajukan Permohonan Justice Collaborator, Republika Online*,” diakses pada 1 Juni 2024, <https://www.republika.co.id/berita/rgao4w328/bharada-e-ajukan-permohonan-justice-collaborator>.

Achmad Nasrudin Yahya. “*Akhirnya Kejagung Akui Richard Eliezer “Justice Collaborator” Awalnya Tolak Mentah-mentah*”. (online), <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/05200061/akhirnya-kejagung-akui-richard-eliezer-justice-collaborator-awalnya-tolak?page=all>, diunduh 1 Juni 2024, 2023.

Arjun Alqindy Tumangger, 2013, *Justice Collaborator dalam Driving Simulator SIM di Korlantas POLRI*, <http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justice-collaborator-dalam-driving-simulator-sim-di-korlantas-polri>, diakses pada 1 Juni 2024.

Aryo Putranto Saptohutomo. “*Kejagung Sebut Pemberian Keringanan Tergantung Kesaksian*”. (online), <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/13213641/kejagung-sebut-pemberian-keringanan-hukuman-bharada-e-tergantung-kesaksian>, diunduh 1 Juni 2024, 2022.

**Eka Maina Listuti, 2024**

**PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA** 79

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Eka Yudha Saputra. “LPSK Layangkan Surat Rekomendasi ke Jaksa Agar Terdakwa Bharada E Diringankan”. (online), <https://nasional.tempo.co/read/1664349/lpsk-layangkan-surat-rekomendasi-ke-jaksa-agar-tuntutan-bharada-e-diringankan>, diunduh 30 Mei 2024, 2022.

Hukumonline, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice collaborator*, diakses dari [0](#), pada tanggal 10 Januari 2023.

*Institute For Criminal Justice Reform*, “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama”, <https://icjr.or.id>, 13 Juni 2016.

Irfan Kamil dan Icha Rastika, “Untuk Richard Eliezer, Ditjen Pas Bakal Beri Remisi Tambahan”. (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/10132121/untuk-richard-eliezer-ditjen-pas-bakal-beri-remisi-tambahan?page=all>), diunduh 1 Juni 2024, 2023.

Irfan Kamil dan Icha Rastika, “Untuk Richard Eliezer, Ditjen Pas Bakal Beri Remisi Tambahan”. (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/10132121/untuk-richard-eliezer-ditjen-pas-bakal-beri-remisi-tambahan?page=all>), diunduh 1 Juni 2024, 2023.

Isnaya Helmi. “Apresiasi Vonis Richard Eliezer, LPSK: Hakim Paham inti Sari Peran *Justice Collaborator*”. (online), (<https://www.kompas.tv/nasional/379612/apresiasi-vonis-richard-eliezer-lpsk-hakim-paham-inti-sari-peran-justice-collaborator?page=all>), diunduh 29 Mei 2024), 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, di akses pada 1 Juni 2024.

LPSK terima 19.238 permohonan perlindungan selama 2019-2024, Antara (Kantor Berita Indonesia), <https://www.antaraneews.com/berita/4117308/lpsk-terima-19238-permohonan-perlindungan-selama-2019-2024>, di akses pada 1 Juni 2024.

Nurhadi. “Inilah Perlindungan yang Didapat Bharada E setelah Berstatus *Justice Collaborator*”. (online), <https://nasional.tempo.co/read/1623476/inilah-perlindungan-yang-didapat-bharada-e-setelah-berstatus-justice-collaborator>, diunduh 29 Mei 2024, 2022.

Prodjodikoro, R. W., *Hukum acara pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1997, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=502758>.

Ridhayanti Nur Shadrina. “Tahanan Bharada E Dipisahkan dari Pelaku Lain”. (online), <https://www.gatra.com/news-550279-hukum-tahanan-bharada-e-dipisahkan-dari-pelaku-lain.html>, diunduh 29 Mei 2024, 2022

Rizky Suryarandika, “Richard Eliezer Bebas Bersyarat Sejak 4 Agustus”. (online), <https://news.republika.co.id/berita/rz2uh7330/richard-eliezer-bebas-bersyarat-sejak-4-agustus>, diunduh 1 Juni 2024, 2023.

Rizky Suryarandika, “Richard Eliezer Bebas Bersyarat Sejak 4 Agustus”. (online), <https://news.republika.co.id/berita/rz2uh7330/richard-eliezer-bebas-bersyarat-sejak-4-agustus>, diunduh 1 Juni 2024, 2023.

Sofian, A., 2018, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*. *Business Law*, diambil 1 Juni 2024, dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justicecollaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.

Wildan Noviansah. “LPSK Ajukan Keringanan Tuntutan Eliezer di Kasus Yosua, Ini Kata Kejagung”. (online), <https://news.detik.com/berita/d-6441437/lpsk-ajukan-keringanantuntutan-eliezer-di-kasus-yosua-ini-kata-kejagung>, diunduh 1 Juni 2024, 2022.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

## **TESIS**

Dedi Gunawan, *Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2023.

Didiek Prasetyo Utomo, *Penegakan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal, 2023.

**Eka Maina Listuti, 2024**

**PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI INDONESIA** 82

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Indriya Setyawati, *Penghapusan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Untuk Mendapatkan Remisi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

Nurullita Rizqia Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.